BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendekatan teoritis yang nantinya akan menunjang proses analisis data. Beberapa teoritik tersebut adalah konsep mulikultiralisme dan politik identitas. Konsep multikulruralisme digunakan dalam penelitian ini dikarenakan fokus penelitian berlandaskan pada kemajemukan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan politik identitas digunakan sebagai pisau analisa dalam menganalisis fenomena identitas agama yang digunakan sebagai legitimasi calon dalam meraih suara.

A. Kerangka Teori

1. Multikulturalisme

Konsep multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama dan lain-lain. Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang memiliki kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existensi* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati keadaan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Parekh, dalam bukunya *Nasional Culture and Multiculturalism*,[1] ia membedakan multikulturalisme menjadi lima macam yaitu:

a. Multikultural Isolasionis, yang mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
b. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, sehingga membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan peraturan, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan mereka, begitupula dengan kaum minoritas yang tidak menantang kultur dominan.
c. Multikulturalisme otomatis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang lebih kolektif dapat diterima. Perhatian pokok kultural lebih kepada mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan, yang memiliki tujuan menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu tatanan masyarakat yang semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

[1] Nicofergiono, "Dilema dan Problem Multikulturalisme", http//Nicofergiono.blogspot.co.id/ 2013/09/dilema-dan problem-multikulturalisme.html?m=1 (diakses pada 01 Oktober 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Multikulturalisme kritikal atau interaktif yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.

e. Multikulturalisme *cosmopolitan*, yaitu paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultur sama sekali bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu.

Selain pernyataan diatas ada konsep multikulturalisme normatif, yaitu suatu sokongan positif bahwa perayaan atas komunal yang secara tipikal didasarkan atas hak dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk dihargai dan diakui yang dapat diperoleh lewat tatanan masyarakat yang lebih luas keberagaman moral dan kulturnya.[2]

Lebih lanjut Pasurdi Suparlan memberikan penekanan bahwa multikulturalisme adalah suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan.

Dalam buku politik multikulturalisme Hefner mengutip pernyataan Furnifall yang menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik.[3] Sehingga masyarakat majemuk menjadi salah satu elemen terbentuknya yang namanya multikulturalisme.

---

[2] Ana Irhandayaningsih, "Kajian Filosofi Terhadap Multikulturalisme Indonesia", *E-Jurnal Humanika Vol 15 No 09.* (Juni: 2012), hal 3

[3] Robert W Hefner, *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan,* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep multikultulasime sebenarnya relatif baru dibandingkan dengan konsep pluralitas maupun dengan konsep keberagaman, konsep multikulturalisme baru muncul pada tahun 1970an.[4] Konsep multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaan itu maka sama diruang publik sehingga dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai sebuah kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa dan agama.

Konsep multikulturalisme sangat diterima baik bagi bangsa Indonesia karena sangat berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang notabennya adalah masyarakat yang majemuk, hal ini terlihat dari wilayah Indonesia yang kepulauan, yang didalamnya terdapat berbagai suku bangsa, Indonesia memiliki 6 agama besar dunia dan mengakui enam agama tersebut sebagai agama resmi pemerintah (Islam, Kristen, Konghuchu, Khatolik, Budha, Hindu) meskipun ada 6 agama besar tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang menganut sistem kepercayaan.

Multikulturalisme bukan doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang manusia, karena banyak negara di dunia terdiri dan tersusun dari beranekaragam kebudayaan. Dimana perbedaan menjadi asasnya sehingga konsep kebijakan multikulturalisme ketika ditransformasikan kepada dunia politik menjadi politik pengelolaan pemberdayaan kebudayaan warga negara.

[4] Zubaidi, "Telaah Konsep Multikulturalisme dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan", (Thesis tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga), hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga model kebijakan multikulturalisme,[5] yang pertama mengedepankan Nasionalitas dimana sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku, bangsa, agama dan bahasa, fungsi dari Nasionalitas ini sebagai perekat integrasi. Kedua yaitu model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat dan berlandaskan hubungan darah, kekerabatan dengan pendiri negara. Selain itu kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasinalitas-etnik.

Ketiga adalah multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak etnik secara kolektif. Dalam model ini keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara serta identitas, asal-asul warganegara diperhatikan.

Konflik *Inhern* dalam konsep multikukturalisme belum menemukan solusi fundamental, sehingga dapat dilihat dalam proses implementasinya terjadi benturan-benturan antara konsep satu dengan konsep yang banyak. Aksi terorisme misalnya menunjukkan bahwa adanya identitas kelompok kultural yang kuat namun pemberontakan terhadap identitas bersama dan kepentingan raykat banyak sebagai sesama warga Indonesia. Para teroris mengorbankan kepentingan dan keselamatan sesama warga Indonesia untuk memperjuangkan tujuan kelompok kulturnya sendiri. Hal ini sama terjadi di belahan dunia dengan ditunjukkan gerakan-gerakan sparatis, sehingga konsep

[5] Ana Irhandayaningsih, "Kajian Filosofi Terhadap Multikulturalisme Indonesia", *E-Jurnal Humanika Vol 15 No 09.* (Juni: 2012), hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

multikulturalisme tidak dapat terimplementasikan karena arogansi dari masing-nasing kelompok.

2. Konsep Politik Identitas

Konsep identitas dari Manuel Castells,[6] dalam triloginya yaitu *The Power Of Identity* menjelaskan bahwa keberadaan identitas akan terbentuk ketika adanya internalisasi. Maka asumsi yang dibangun oleh Manuel, identitas berasal dari internalisasi, yang mempengaruhi identitas adalah proses pemaknaan pada aturan yang telah diterapkan oleh suatu institusi.

Konstruksi identitas sendiri dalam prosesnya sangat tergantung pada beberapa hal yang berasal dari beberapa konteks seperti geografi, institusi, sejarah dan agama.

Sehingga ketika ini berlangsung secara masif akan melahirkan sesuatu keadaan *Network Societie* atau masyarakat jaringan saja. Hal ini akan meluas kepada beberapa bidang kehidupan seperti bidang politik, bidang budaya, bidang ekonmi, dan juga bidang kebudayaan tidak luput dari pengaruh ini.

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik dengan politik identitas.[7] Perbedaan ini dilihat dari identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subyek didalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumber dan sarana politik.

---

[6] M Nurun Najib, "Konstruksi Identitas Keagamaan (Studi tentang pondok pesantren Al-Mukmin ngruki dengan Masyarakat Lokal)", (Thesis tidak diterbitkan, Universitas Indonesia) Hal 5

[7] Muhtar Haboddin, "Menggugat Politik Identitas Di Ranah Lokal", Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Brawijaya Vol 3 No 1. (Februari 2012), hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat memungkinkan dan mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Karena itu ilmuan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih oprasional. Seperti Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai seuatu kategori politik yang utama.[8] sedangkan Donald L Morowitz mendefinisikan politik identitas adalah garis yang tegas untuk menentukan siapa yang diikutsertakan dan siapa saja yang ditolak. Karena garis penentu tersebut sangat nampak tidak dapat dirubah.

Dari pernyataan kedua tokoh di atas bisa ditarik benang merahnya bahwa politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Meskipun ada beberapa ahli yang memaknai politik identitas di tataran praktis yang biasanya digunakan sebagai alat manipulasi. Alat yang digunakan untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik, tidak bisa dilepaskan politik identitas sangat berhubungan dengan ikatan kesukuan yang mendapatkan peranan penting karena dari sini muncul simbol-simbol yang potensial serta berkembang menjadi sesuatu kekuatan untuk aksi-aksi politik.

Pemahaman di atas berdampak pada kecenderungan ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik dalam bidang ekonomi, politik sosial dan budaya. Selanjutnya demi menjaga dan melestarikan budaya yang menjadi suatu ciri khas kelompok yang

[8] *Ibid*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan. Serta yang terakhir kesetiaan yang kuat dalam entitas yang dimilikinya.[9]

Politik identitas pada dasarnya membangun kembali narasi besar yang pada prinsipnya mereka tolak dan membangun teori yang mengedepankan faktor-faktor biologis sebagai penyusunan berbedaan-berbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dalam politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem pemisah ketika kekuasaan tidak dapat di taklukan dan pembagian kekuasaan tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisah dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluarnya, kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok spesifik dari ilmu.

Tabel 2.1

Tabel Model Politik Identitas

Model	Pola Keterangan	Pola Aksi	Tujuan Gerakan
Pra Modern	Perpecahan obyek (dimana ada perpecahan fundamentalisme pasti ada gerakan sosial yang menyeluruh)	Mobilisisasi secara ideologis atas inspirasi pemimpin	Perampasan kekuasaan
Modern	Pendekatan kondisional (keterpecahan membutuhkan sumber-	Keseimbangan mobilisasi dari atas dan	Pembagian kekuasaan

[9] Ibid. Hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	sumber untuk dimobilisasi)	partisipasi dari bawah	
Postmodern	Gerakan dan dinamikanya sendiri. Proses muncul dari berbagai kesempatan individu. Tidak mendapat suatu perpecahan yang dominan	Kesadaran diri	otonomi

Sumber: Muhtar Haboddin 2012; 6

Di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili oleh elit-elit.[10]

Agama adalah salah satu dasar/basis dari identitas. Dalam pengertian ini agama bersama faktor lainnya seperti bahasa, sejarah bersama dll membentuk suatu identitas dari suatu masyarakat yang membedakan dengan masyarakat yang lain. Agama juga berpengaruh kepada perilaku individu maupun kelompok, semakin besar kepercayaan agama terlibat maka semakin berkurang kemungkinan terjadinya kompromi dan akomodasi. Doktrin agama juga bisa mempengaruhi perilaku dalam melakukan beberapa tindakan dan keputusan yang dibuat serta menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi

[10] Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Democrazy Project edisi digital, 2012), hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Meskipun pihak lain menganggapnya tidak dapat dibenarkan, seperti tindakan bom bunuh diri dan lain-lain.

Penggunaan politik identitas yang pada dasarnya bersifat pada budaya akan menempati tiga wilayah publik yang menjadi pertarungan diantara banyak kepentingan kultural.[11] Pertama Penggunaan politik identitas dimainkan perannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Yang artinya pada sisi ini, politik identitas suatu kelompok akan menjadi identitas nasional suatu bangsa melalui penguasaannya atas negara. Dalam konteks bernegara kepentingan kelompok dapat diatasi dengan cara mengandaikan bahwa identitas etnis tidak menjadi identitas dominan.

Sisi kedua, Penggunaan politik identitas di wilayah agama. Wilayah ini dapat mengatasi wilayah negara bila aspek-aspek identitas etnis dapat diatasi. Sehingga bila politik identitas beroperasi melalui wilayah ini kepentingan kelompok yang paling menonjol adalah kepentingan kelompok tetapi kehilangan ciri identitas etnisnya.

Yang ketiga adalah wilayah hukum, Wilayah ini perpaduan antara wilayah negara dan wilayah agama, karena masing-masing memiliki aturan sendiri. Pada sisi ini politik identitas beroprasi dengan cara membagi kekuasaan dimana identitas kelompok akan memasukan kepentingan identitasnya secara partikular. Kemungkinan interaksi di dalam kelompok akan menjadi dasar bagi hubungan politik identitas yang dibangun sangatlah besar,

[11] Ahmad Ibrahim Badry, https://www.academia.edu/27766548/ Politik_Identitas_sebagai_Modus_ Multikulturalisme (diakses pada Sabtu 14 Januari 2017, pukul 20:36 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun demikian hal ini tidak akan terjadi ketika kepentingan dari politik identitas etnis yang bersifat minoritas tidak menjebatani melalui pengakuan hak-haknya untuk berpartisipasi di wilayah pembuatan keputusan hukum secara bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id